

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹Ilviani, ²Monalisa Ibrahim, ³Ahmad Mannu, ⁴Rahman Yakub
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

ilviani@gmail.com
monalisa2231@gmail.com
ahmadmannu@gmail.com
rahmanyakub@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan daerah perda pengelolaan sampah tahun 2016 di Kabupaten Sideng Rappang, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan daerah tahun 2016 terhadap pengelolaan sampah. Populasi dalam penelitian ini adalah 319.900 orang di Kabupaten Sidenng Rappang, dimana pengambilan sampel digunakan dengan probability sampling dengan metode simple random sampling memakai rumus Slovine dengan jumlah sampel sebanyak 106. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah observasi, kuisisioner, wawancara, revisi sastra. Metode analisis informasi yang digunakan merupakan statistik deskriptif, regresi linier, uji hipotesis memakai SPSS 16.0 serta skala likert. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel implementasi kebijakan terhadap manajemen pengelolaan yaitu 55,4%, a. Komunikasi dengan interpretasi 54,8%, sumber daya 50,8%, pengaturan/sikap 51%, struktur birokrasi 52,2%, dikategorikan tidak baik, sedangkan pengelolaan sampah sudah diklasifikasikan, b. Perencanaan sebesar 53,8%, pengorganisasian 55,6%, yang berhasil 54,2% dan pengawasan sebesar 52,8% dengan kategori "tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pengelolaan sampah adalah partisipasi Masyarakat (55%) dengan kategori kurang baik dan sumber daya manusia (58,6%) (58,6%) dengan kategori kurang baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Manajemen Pengelolaan

Abstract

This study aims to determine the implementation of the regional policy of 2016 waste management regulation at Sidenng Rappang Regency, and to find out what factors influence the implementation of the 2016 regional policy on the management of waste management. The population in this study was 319.990 people in Sidenng Rappang Regency, where sampling was used with a probability of sampling with a simple random sampling technique using the Slovine formula with a total sample of 106. Information collection techniques Used were observations, questionnaires, interviews, revision of literature. . The information analysis technique used are descriptive statistics, linear regression, hypothesis test using SPSS 16.0 and a Likert scale. The results of this study show that the effect of policy implementation variables on management management is 55.4%, a. Communication with interpretation 54.8%, resources 50.8%, 51% arrangement / attitude, bureaucratic structure 52.2%, categorized as is not good, while waste management has been classified, b. Planning of 53.8%, organizing 55.6%, which works 54.2% and supervision of 52.8% with the "not good" category. The factors that influence the management of waste management are the participation of the Community (55%) with the category is not good "and human resources (58.6%) (58.6%) with the category of the It's not good.

Keywords: Policy Implementation and Management Management.

A. PENDAHULUAN

Semakin banyak ahli yang membahas konsep implementasi bersama dengan banyak ahli. Sebagai tahapan proses politik, mereka menyumbangkan ide-ide untuk implementasi pedoman. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terlihat setelah instruksi efektif dari kebijakan tersebut. Kegiatan ini melibatkan upaya untuk mengelola input agar menghasilkan output atau hasil bagi masyarakat. Menurut pernyataan tersebut (Agusino, 2014: 138), pemahaman umum tentang implementasi kebijakan dapat ditemukan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu cara dimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat rumit, seringkali dengan nuansa politik dan melibatkan kepentingan yang berbeda. (Nurmalasyiah dan Suryani, 2018).

Sebagai ilmu, manajemen bersifat universal dan sistemik, termasuk aturan, prinsip, dan konsep yang terkait dengan landasan teori. Landasan teori tersebut termasuk dalam fungsi dasar manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi sampai pada tahap evaluasi (evaluation). Menentukan dan mencapai tujuan yang ditetapkan melalui penggunaan sumber daya manusia. Manajemen sulit untuk didefinisikan, dan tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal. Manajemen berasal dari kata management, yang dalam bahasa latin manus berarti: memimpin, mengolah, mengelola, atau memimpin.

Pengelolaan sampah adalah sistem pengelolaan sampah, berdasarkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pembuangan (Chalam et al, 2009). Beberapa faktor memiliki pengaruh terhadap upaya memaksimalkan keberhasilan sampah dari rumah. Ada beberapa faktor yang diterima secara internasional yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah, yaitu atribut sosio-demografis, situasi dan kondisi lingkungan, sikap individu terhadap pengelolaan sampah, standar pribadi, norma sosial, informasi dan pengetahuan, dan persepsi individu (Vitor dan Martino, 2016).

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah sampah karena setiap hari manusia menghasilkan sampah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya aktivitas penduduk, sehingga

jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga bertambah. Volume pemborosan dan tipologi yang dihasilkan tergantung pada model konsumsi suatu perusahaan dalam suatu perusahaan perusahaan

Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka semakin besar volume sampah dan jenis sampah yang dihasilkan paling banyak. (Distrik et al., 2014). Sampah adalah suatu benda yang tidak memiliki nilai dan tidak berharga dengan kata lain dalam proses produksi atau penggunaan produk yang rusak atau cacat dalam proses produksi atau kelebihan bahan atau pada barang yang ditolak atau dalam bentuk dibuang. produk. Dalam proses pengelolaan sampah, ada tahapan-tahapan yang akan dilalui, yaitu mulai dari rumah, Tempat Pembuangan Akhir (TPS), tempat pembuangan sampah.

Tempat Terpadu (TPST) dan Penyelenggara Akhir (TPA). Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dimana sampah mencapai tahap akhir pengelolaannya, mulai dari sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) merupakan layanan publik atau instalasi kota yang akan memberikan manfaat kepada Masyarakat untuk meminimalkan dampak TPA dan pencemaran lingkungan. Pemerintah menyediakan TPST sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan masyarakat. (DIT AL., 2019).

Definisi limbah secara umum sering digunakan untuk menyatakan residu padat, limbah juga didefinisikan berdasarkan sudut pandang lain. Dari segi ekonomi, misalnya, sampah didefinisikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah mengalami pengolahan, baik karena bagian utamanya telah diambil, maupun karena diolah, dan karena tidak ada manfaat dari suatu lingkungan sosial ekonomi. sudut pandang, mereka tidak memiliki nilai atau ditafsirkan sebagai bahan baku. Dibuang atau dibuang oleh hasil kegiatan manusia dan proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dari segi lingkungan, limbah dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan. (Kahfi, 2017).

Kastaman dan Kramadibrata (2007: 69), sampah adalah sampah padat, terdiri dari zat atau bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna dan harus dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Dari batasan ini jelas bahwa sampah. Ini

adalah hasil dari aktivitas manusia yang dibuang karena tidak lagi berguna atau tidak berguna. (Sari dkk., 2011).

Secara total, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 11 ruas jalan dan 106 desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah. Pembahasan pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang disediakan tidak memenuhi standar operasional prosedur (ada yang rusak, tidak layak pakai, dan tidak ada perawatan), bahkan jasa pembuangannya sudah dicopot, tidak disentuh sama sekali). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang mengarah pada pergerakan linier sampah yang dihasilkan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang memadai dan memadai serta peran pemerintah dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul implementasi kebijakan peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 terhadap manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 07 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 07 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan pedoman yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses implementasi sangat dipengaruhi oleh cara berbagai tujuan dicapai melalui tujuan. Implementasi juga merupakan langkah penting dalam struktur politik karena masalah publik mungkin atau mungkin tidak diselesaikan melalui proses ini. Implementasi kebijakan juga merupakan salah satu fase ketertiban umum antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi politik masyarakat yang terkena dampaknya. Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III dalam Leo Agustino (2017: 136141) yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Disposisi, Sumber Daya.

Manajemen sebagaimana Hasibuan (2011) adalah ilmu dan seni yang mengatur proses penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika melakukan sesuatu, pemimpin organisasi tidak hanya bekerja sendiri, tetapi disaksikan melalui aktivitas orang lain atau bawahan yang merupakan perpanjangan tangan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga mencapai tujuan yang diinginkan. (Saputri dkk., 2019). Manajemen menurut George Terry (Zainuddin, 2017) yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan.

B. METODE PENELITIAN

Metode pencarian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pencarian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan sebanyak 319.990 orang, sedangkan teknik pengambilan sampel dalam hal ini adalah probability sampling dan teknik penarikan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, hasil perhitungan diatas maka penulis menentukan jumlah sampel yaitu 106 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis statistik deskriptif, Langkah terakhir adalah mendeskripsikan hasil analisis data untuk mencapai kesimpulan akhir yang dapat ditarik. Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis dengan model skala Likert.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kuisisioner yang dibagikan kepada responden, dapat diperoleh informasi pelaksanaan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyampaian informasi dalam manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa dari 106 responden menjawab sangat baik, yaitu 6,6%, 25 menjawab baik, 23,6%, dan 30 kurang, terhitung 6,6%. 28,3%, 22 orang dengan jawaban buruk, terhitung 20,8%, dan 22 orang dengan jawaban buruk, terhitung 20,8%. hasil pengolahan data di atas, bahwa pelaksanaan pedoman berupa proses

pemberian informasi berdasarkan hasil tergolong “tidak baik”, yaitu sebesar 54,8%, karena proses yang dilaksanakan tidak lancar. Sampai dengan adanya peraturan di Kecamatan 07 tahun 2016, Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat melalui pengelolaan sampah.

Pembagian struktur kerja dalam manajemen pengelolaan sampah sesuai yang direncanakan dalam manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa dari 106 responden, 7 responden menjawab sangat baik, 6,6%, 10 menjawab baik, 9,4%, dan tidak menjawab sangat baik. 34 orang dengan jawaban baik menyumbang 32,1%, 38 orang dengan jawaban buruk menyumbang 35,8%, dan 17 orang dengan jawaban buruk menyumbang 16,0%, didasarkan pada pembagian kerja. Kebijakan tersebut tergolong “buruk”, dengan rasio 50,8%, karena pembagian kerja dan struktur kerja pengelolaan sampah tidak sesuai dengan rencana pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kecenderungan para pelaku kebijakan dalam manajemen pengelolaan sampah sehingga terwujudnya tujuan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa 7 dari 106 responden menjawab sangat baik dengan 6,6%, 10 menjawab baik dengan 9,4% dan 36 tidak menjawab baik, 35 orang menjawab buruk, yang sesuai dengan 33,0%; 18 orang menjawab kurang baik, yaitu 17,0%. Hal dapat kesimpulan bahwa implementasi kebijakan berupa kecondongan aktor politik dengan 51% hasil akibat sikap pemangku kepentingan pengelolaan sampah tidak tepat, oleh karena itu tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah kabupaten adalah, bahwa Sidenreng Rappang tidak tercapai.

Sumber daya manusia dalam kegiatan manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa 8 dari 106 responden menjawab sangat baik, sebanyak 7,5%, 11 responden menjawab baik, 10,4%, dan tidak menjawab baik. , 39 orang menyumbang 36,8%, 28 orang menjawab buruk, 26,4%, dan 20 orang menjawab sangat buruk, terhitung 18,9%. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sumber daya manusia tergolong “buruk” dengan persentase 52,2 yang sesuai dengan hasil karena sumber daya yang tersedia di persampahan adalah pengelolaan administratif Sidenreng Rappang Kegiatan selama pemerintahan tidak cukup.

Proses kegiatan dalam penetapan tujuan manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa dari 106 responden, 8 orang menjawab sangat baik yaitu sesuai dengan 7,5%, 12 orang menjawab baik yaitu 11,3% dan jawaban sangat tidak baik. , ada 44 Orang (41,5%), 24 orang dengan jawaban buruk (22,6%) dan 18 orang dengan jawaban buruk (17,0%). hasil pengolahan data di atas, kesimpulan bahwa berdasarkan hasil 53,8%, implementasi kebijakan berupa proses kegiatan tergolong “tidak baik” karena proses kegiatan mencapai tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang Es tidak berjalan dengan baik.

Pembagian struktur kerja dalam manajemen pengelolaan sampah sesuai dengan yang direncanakan dalam manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa dari 106 responden, 8 responden menjawab sangat baik dengan 7,5%, 16 menjawab baik dengan 15,1% dan 42 dengan kurang baik 39,6%. , 25 orang dengan jawaban buruk (23,6%) dan 15 orang dengan jawaban buruk (14,2%). hasil pengolahan data, dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan 55,6% hasil, pelaksanaan kebijakan berupa struktur pembagian kerja tergolong “tidak baik”, karena pembagian tenaga kerja dan struktur kerja pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai rencana.

Pengawasan kegiatan dalam manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa dari 106 jumlah responden terdapat 7 orang yang menjawab sangat baik dengan persentase 6,6%, responden yang menjawab baik, ada 11 orang yang menjawab dengan baik. persentase 10,4%, responden yang menjawab kurang baik, ada 44 orang dengan persentase 41,5%, responden yang menjawab kurang baik, ada 33 orang dengan persentase 31,3%, responden yang menjawab sangat tidak baik ada sebanyak 11 orang dengan persentase 10,4%. hasil pengolahan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan berupa kegiatan monitoring sesuai dengan hasil dengan persentase 54,2% tergolong “kurang baik”, karena Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemberian petunjuk dalam kegiatan manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa dari 106

responden 7 orang dengan jawaban sangat baik 6,6%, 12 orang dengan jawaban baik 11,3% dan 38 orang dengan jawaban buruk 35,8%, 34 orang dengan jawaban buruk Tanggapan, 32,1%, dan 15 orang dengan tanggapan buruk, 14,2%. hasil pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pedoman berupa petunjuk dengan porsi 52,8% tergolong “buruk”, karena petunjuk pengelolaan sampah tidak diberikan oleh Pemkab Sidenreng Rappang. Dapatkan eksekusi terbaik.

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa dari 106 jumlah responden terdapat 5 orang yang menjawab sangat baik dengan persentase 4,7%, responden yang menjawab baik ada 17 orang dengan persentase 16,0%, responden yang menjawab kurang baik, ada 40 orang dengan persentase 37,7%, responden yang menjawab kurang baik, ada 39 orang dengan persentase 36,8%, responden yang menjawab sangat buruk adalah 5 orang dengan persentase 4,7%. hasil pengolahan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berupa partisipasi Masyarakat sesuai dengan hasil dengan persentase 55. Dikategorikan “tidak baik”, karena partisipasi Masyarakat Untuk pengelolaan sampah tidak dilaksanakan dengan benar.

Kemampuan pengelolaan manajemen pengelolaan sampah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa 6 dari 106 responden menjawab sangat baik dengan 5,7% dan 25 dengan 23,6% menjawab baik. %, 35 orang menjawab jelek yaitu 33,0%, 36 orang menjawab jelek yaitu 34,0%, dan 4 orang menjawab jelek yaitu 3,8%. hasil pengolahan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berupa kemampuan manajemen manajemen sesuai dengan hasil dengan persentase 58,6 yang tergolong “tidak baik” karena peralatan berada di Kabupaten Sidenreng Rappang. kegiatan pembuangan sampah tidak baik.

Implementasi kebijakan regulasi PP 07 Tahun 2016 dapat dikatakan berhasil apabila dapat mengarah pada dan meningkatkan pengelolaan pengelolaan sampah dalam setiap kegiatannya. Saat mengimplementasikan dioperasikan sebagai:

1. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Dengan adanya komunikasi dapat mempermudah proses penyampaian

informasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Struktur birokrasi adalah pembagian struktur kerja dan kewenangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bekal/sikap adalah kecenderungan pelaku politik dalam pengelolaan pengelolaan sampah sehingga tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu. Dengan perencanaan yang matang dapat mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Organisasi adalah pembagian kerja yang dimaksudkan untuk melaksanakan hak dan fungsi masing-masing. Dengan pembagian kerja yang jelas tentunya dapat memudahkan realisasi tugas dan fungsinya tanpa memuat pengelola sampah ke Kabupaten Sidenreng Rappang dengan banyak pekerjaan.
7. Pengendalian/motivasi adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan motivasi, inspirasi, semangat. Dengan adanya pemberian motivasi kepada pengelola persampahan dapat memberikan semangat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Pidato adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan instruksi atau instruksi bagi yang lebih tinggi dari pada bawahan atau orang yang diselenggarakan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan alamat tersebut, Anda dapat mempermudah pengelolaan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Partisipasi masyarakat, yaitu partisipasinya dalam persiapan dan perencanaan kegiatan. Dengan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan sampah dapat dikatakan berhasil karena tujuan ini ditujukan untuk kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Sumber daya manusia adalah segala daya dukung diri atau kemampuan yang

dimiliki manusia. Dengan memiliki kapasitas/skill dapat memudahkan dalam pengelolaan pengelolaan sampah. Dengan kurangnya sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah menjadi kurang efektif di Kabupaten Sidenrg Rappang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan umum yang dicapai peneliti adalah Rata-rata dampak penerapan peraturan daerah adalah 55,4%. Persentase indikator implementasi kebijakan tertinggi adalah komunikasi, 54,8%, dan sumber daya terendah 50,8%. Persentase indikator manajemen tertinggi adalah organisasi sebesar 55,6%, sedangkan persentase terendah adalah pengawasan sebesar 52,8%. Diantara faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah, proporsi sumber daya manusia tertinggi sebesar 58,6%, sedangkan proporsi partisipasi masyarakat terendah sebesar 55%.

E. REFERENSI

Ahmad, J. (2015). *Metode penelitian teori administrasi publik dan penerapannya*. Yogyakarta: Gaya Media.

Doltianus, M. &. (2017). Analisis Implementasi Perda 2013 2013 Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. *Reformasi majalah administrasi (vas)*, 4 (1), 3447.

Dwi Arini Setyawati, H. (2014). Implementasi kebijakan asosiasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPA Kesehatan Jatibarang. *Katalog majalah*, 2, 1522.

Hariyadi, C. A. (2020). Perencanaan tempat pembuangan sampah dan 3R (reduction, re-use, daur ulang) pengelolaan sampah di Desa Sukadana. *Jurnal Warta Desa*, 2 (1), 6672.

Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan masalah*. Yogyakarta: Gava Media .

Muhammad. (2019). *Pengantar Administrasi Publik*. Sulawesi: Pers Unik.

Nawawi, I. (2009). *Kebijakan publik, analisis, teori dan praktik strategi pertahanan*. Surabaya: PMN.

Rahman, F. (. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya (Studi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Taman Higiene dan Lingkungan. *Buku harian administrasi dan ilmu administrasi*.

Rahman, M. (2017). *Ilmu Amministratif*. Makassar: CV. Valida Media.

Sahar, M. T. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Covid-19 di kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 76-86.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan gabungan (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.